



Strategi Diplomasi Keamanan Indonesia dalam Menanggulangi Radikalisasi Pasca-Konflik Poso

Afifah Winda Ramadhani

Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin

Korespondensi penulis : afifahwinda100@gmail.com

Abstract : *This writing discusses Indonesia's security diplomacy strategy in addressing post-conflict radicalization in Poso, Central Sulawesi. After experiencing prolonged communal conflict, the Poso region has become one of the areas most vulnerable to the spread of violent extremist ideology. To respond to this threat, Indonesia has developed a security diplomacy strategy that includes national, regional, and international cooperation. At the domestic level, through institutions such as BNPT, Indonesia implements deradicalization programs, social reintegration, and strengthening of community resilience. Meanwhile, at the regional and global levels, Indonesia actively participates in various forums and bilateral cooperation such as AMMTC, TCA, ARF, and establishes strategic partnerships with partner countries like the United States, Australia, Japan, and South Korea. The findings of this article show that Indonesia's security diplomacy is a crucial instrument in creating long-term stability and preventing the resurgence of extremism in post-conflict areas such as Poso.*

Keywords: *Security Diplomacy, Radicalization, Post-Conflict, Poso, Regional Cooperation, Counter-Terrorism*

Abstrak : Tulisan ini membahas strategi diplomasi keamanan Indonesia dalam menanggulangi radikalisasi pasca-konflik di Poso, Sulawesi Tengah. Setelah mengalami konflik komunal berkepanjangan, wilayah Poso menjadi salah satu daerah paling rentan terhadap penyebaran ideologi ekstremisme kekerasan. Untuk merespons ancaman ini, Indonesia mengembangkan strategi diplomasi keamanan yang mencakup kerja sama nasional, regional, dan internasional. Di tingkat domestik, melalui lembaga seperti BNPT, Indonesia menjalankan program deradikalisasi, reintegrasi sosial, serta penguatan ketahanan masyarakat. Sementara itu, di tingkat regional dan global, Indonesia aktif dalam berbagai forum dan kerja sama bilateral seperti AMMTC, TCA, ARF, serta menjalin kemitraan strategis dengan negara mitra seperti Amerika Serikat, Australia, Jepang, dan Korea Selatan. Temuan artikel ini menunjukkan bahwa diplomasi keamanan Indonesia merupakan instrumen krusial dalam menciptakan stabilitas jangka panjang dan mencegah kebangkitan ekstremisme di wilayah pasca-konflik seperti Poso.

Kata kunci: Diplomasi keamanan, radikalisasi, pasca-konflik, Poso, kerja sama regional, kontra-terorisme

1. PENDAHULUAN

Radikalisasi adalah proses ketika seseorang atau sekelompok orang mulai mengadopsi pandangan ekstrem yang bertentangan dengan nilai-nilai moderat dalam masyarakat dan dalam banyak kasus, radikalisasi ini mengarah pada pembenaran terhadap kekerasan atau tindakan terorisme. Proses ini sering kali dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, ekonomi, dan ideologis, termasuk pengalaman ketidakadilan, marginalisasi, atau trauma akibat konflik (Asrori, 2019). Di Indonesia, radikalisasi menjadi ancaman serius bagi keamanan nasional karena dapat mendorong terbentuknya jaringan terorisme, mengganggu stabilitas sosial-politik, serta menciptakan ketakutan di masyarakat. Ancaman ini tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan, tetapi juga terjadi di daerah-daerah yang pernah mengalami konflik kekerasan, seperti Poso di

Sulawesi Tengah. Poso adalah contoh nyata wilayah pasca-konflik yang rentan terhadap radikalisasi. Setelah mengalami konflik komunal antara kelompok Muslim dan Kristen pada 1998–2001, wilayah ini mengalami polarisasi sosial dan lemahnya rekonsiliasi. Situasi ini dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk melanjutkan aksi kekerasan dan terorisme dengan menyebarkan ideologi kekerasan, dan membangun basis dukungan, seperti yang dilakukan oleh kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) (Sirua & Priyambodo, 2022).

Dalam menghadapi ancaman radikalisasi dan terorisme, pendekatan keamanan yang hanya mengandalkan kekuatan bersenjata tidak lagi cukup. Diplomasi keamanan menjadi salah satu instrumen penting karena menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, dengan menempatkan kerja sama, negosiasi, dialog, dan pencegahan sebagai komponen utama dalam menjaga stabilitas nasional. Strategi ini mencakup kerja sama antara aktor nasional dan internasional, pembentukan kebijakan deradikalisasi yang terstruktur, serta partisipasi aktif Indonesia dalam forum-forum global yang membahas penanggulangan terorisme dan ekstremisme (Muara, Rahmat & Prasetyo, 2021).

Pendekatan diplomatik memungkinkan terciptanya sinergi antarnegara dalam berbagi informasi intelijen, memperkuat kapasitas kelembagaan, serta meningkatkan efektivitas program deradikalisasi dan reintegrasi sosial (Muara et al., 2021). Indonesia sendiri telah mengimplementasikan strategi ini melalui berbagai upaya. Di tingkat nasional, dibentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang memiliki mandat untuk merancang dan melaksanakan program deradikalisasi, termasuk melibatkan tokoh agama, psikolog, dan mantan narapidana terorisme (Agustin & Situmeang, 2023). Dalam ranah internasional, Indonesia menjalin kerja sama bilateral dan multilateral, seperti dengan Australia, Amerika Serikat, serta negara-negara ASEAN, dalam bentuk pelatihan kontra-terorisme, pertukaran intelijen, dan penguatan kapasitas institusi keamanan. Indonesia juga aktif dalam forum internasional seperti *ASEAN Regional Forum* (ARF), *Global Counter Terrorism Forum* (GCTF), dan *United Nations Counter-Terrorism Centre* (UNCCT) untuk mendorong agenda global dalam memerangi radikalisasi dan terorisme. Melalui strategi diplomasi keamanan, Indonesia tidak hanya mengamankan wilayahnya dari ancaman ekstremisme, tetapi juga menunjukkan komitmennya sebagai aktor penting dalam menjaga stabilitas keamanan regional dan global (Muara et al., 2021).

Sebelum memasuki pembahasan, penting untuk menegaskan bahwa analisis dalam jurnal ini akan difokuskan pada dua rumusan masalah utama. Pertama, penulis akan menguraikan bagaimana kondisi sosial, politik, dan keamanan di Poso pasca-konflik, termasuk ancaman radikalisme yang muncul pasca-konflik serta upaya rekonsiliasi yang telah ditempuh oleh pemerintah dan masyarakat sipil. Pemahaman terhadap konteks pasca-konflik ini menjadi dasar penting dalam menilai keberlanjutan perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut. Kedua, penulis akan membahas secara mendalam mengenai bagaimana strategi diplomasi keamanan Indonesia dalam menanggulangi radikalisme pasca-konflik Poso, khususnya melalui kerja sama regional dan internasional. Hal ini mencakup keterlibatan Indonesia dalam forum multilateral, kolaborasi antar-lembaga seperti BNPT dan kepolisian, serta pendekatan lunak yang menekankan pendidikan damai, deradikalisasi, dan reintegrasi sosial. Strategi ini dianalisis dalam kerangka diplomasi keamanan yang tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada pembangunan perdamaian jangka panjang dan pencegahan konflik berulang.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah studi kepustakaan atau literatur (*library research*) yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan strategi diplomasi keamanan Indonesia dalam menangani radikalisme pasca-konflik, khususnya di wilayah Poso. Data dikumpulkan dari berbagai referensi utama seperti buku, jurnal akademik, serta artikel ilmiah baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris yang relevan dengan topik ini.

3. PEMBAHASAN

Kondisi Pasca-Konflik Poso

Konflik komunal yang melanda Poso sejak akhir tahun 1998 hingga awal 2000-an merupakan salah satu tragedi kemanusiaan yang menyisakan luka mendalam bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Konflik yang awalnya dipicu oleh ketegangan sosial dan ketimpangan politik lokal ini kemudian berkembang menjadi benturan bernuansa sektarian antara komunitas Muslim dan Kristen (Alganih, 2016). Setelah berbagai upaya penyelesaian, puncaknya tercapai

pada penandatanganan Deklarasi Malino II tahun 2001 yang secara resmi menandai berakhirnya kekerasan terbuka. Namun demikian, kondisi pasca-konflik Poso tidak serta-merta menunjukkan pemulihan yang menyeluruh. Sebaliknya, wilayah ini menghadapi tantangan serius dalam membangun kembali tatanan sosial, ekonomi, budaya, dan keamanan yang berkelanjutan (Wijaya, 2020).

Secara sosial, masyarakat Poso mengalami dislokasi identitas dan keterpecahan yang dalam. Konflik yang berlangsung selama bertahun-tahun telah menciptakan segregasi berbasis agama dalam kehidupan sehari-hari (Alganih, 2016). Komunitas Muslim dan Kristen cenderung hidup dalam ruang sosial yang terpisah, baik dalam hal pemukiman, pendidikan, maupun aktivitas keagamaan. Meskipun kekerasan bersenjata telah berakhir, ketegangan dan kecurigaan antarkelompok tetap terasa. Proses rekonsiliasi berlangsung lambat karena trauma kolektif dan minimnya ruang dialog yang setara. Meski demikian, sejumlah inisiatif dari pemerintah daerah, tokoh agama, dan organisasi masyarakat sipil seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) berupaya menghidupkan kembali komunikasi lintas komunitas melalui dialog damai dan kegiatan sosial Bersama (Mubarok, 2014).

Dari sisi ekonomi, konflik menyebabkan kerusakan infrastruktur vital serta menurunnya produktivitas masyarakat. Banyak fasilitas umum seperti pasar, sekolah, rumah ibadah, dan layanan kesehatan hancur atau tidak berfungsi dengan baik selama konflik. Hal ini mempersulit kehidupan ekonomi masyarakat, terutama di sektor informal yang sangat tergantung pada stabilitas sosial. Pemerintah pusat dan daerah bersama mitra internasional berusaha mendorong pembangunan kembali wilayah ini melalui berbagai program bantuan dan pemberdayaan ekonomi. Meski beberapa capaian telah diraih, ketimpangan pembangunan masih terlihat antara wilayah yang terdampak konflik dengan daerah lain di Sulawesi Tengah yang lebih stabil (Mertayasa, 2014).

Sementara itu, aspek keamanan menjadi perhatian utama dalam periode pasca-konflik Poso. Meski kekerasan berskala besar telah mereda, wilayah ini berubah menjadi medan pergerakan kelompok radikal bersenjata. Radikalisasi juga terjadi karena minimnya program deradikalisasi yang menyentuh akar persoalan, seperti ketimpangan ekonomi, keterbatasan akses pendidikan, serta keterlibatan masyarakat dalam proses rekonsiliasi (Supriadi et al., 2020). Narasi ketidakadilan baik dalam penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan,

distribusi bantuan rekonstruksi, maupun dalam representasi politik lokal memperkuat sentimen marjinalisasi yang kemudian dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok ekstrem sebagai bahan bakar ideologis.

Poso menjadi salah satu basis utama kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang dipimpin oleh Santoso dan memiliki koneksi dengan jaringan radikalisme transnasional. Mereka memanfaatkan kondisi sosial yang rentan dan kawasan pegunungan yang sulit dijangkau untuk merekrut anggota dan memperkuat kekuatan mereka (Sirua & Priyambodo, 2022). MIT bukan hanya menjadikan aparat keamanan sebagai target penyerangan, tetapi juga memelihara ketegangan sektarian dengan tujuan menciptakan kembali konflik terbuka demi membenarkan eksistensi mereka. Negara menanggapi ancaman ini melalui Operasi Tinombala yang diluncurkan sejak 2016, melibatkan TNI dan Polri dalam operasi pengejaran terhadap sisa-sisa jaringan teroris di wilayah tersebut. Keberhasilan operasi ini memang telah melumpuhkan sebagian besar kelompok MIT salah satunya adalah Santoso yang merupakan pemimpin dari MIT, namun potensi regenerasi dan penyebaran ideologi ekstremisme tetap menjadi ancaman yang nyata (Sirua & Priyambodo, 2022).

Secara umum, kondisi Poso pasca-konflik telah mengalami banyak perubahan menuju arah yang lebih baik. Aktivitas masyarakat perlahan kembali normal, pembangunan infrastruktur mulai berjalan, dan roda pemerintahan lokal berfungsi stabil. Butuh waktu bertahun-tahun untuk masyarakat Poso bisa merasakan keamanan setelah konflik terjadi. Namun demikian, stabilitas ini belum sepenuhnya berdiri di atas fondasi rekonsiliasi yang kokoh. Terdapat kekhawatiran bahwa perdamaian yang tercipta lebih bersifat “negatif peace”, yakni ketiadaan konflik terbuka, ketimbang “positive peace” yang ditandai oleh keadilan sosial, integrasi komunitas, dan pemulihan relasi antarkelompok secara menyeluruh. Dalam konteks ini, pemahaman yang utuh mengenai kondisi pasca-konflik menjadi penting sebagai dasar dalam merumuskan strategi diplomasi keamanan yang tepat, khususnya dalam menanggulangi ancaman radikalisasi di wilayah yang rawan seperti Poso.

Strategi Diplomasi Keamanan Indonesia

Diplomasi keamanan merupakan salah satu bentuk diplomasi modern yang berfungsi sebagai kerangka kebijakan dalam mengelola isu-isu keamanan lintas batas negara melalui pendekatan dialog, kerja sama strategis, dan pertukaran kebijakan. Dalam konteks Indonesia, diplomasi keamanan tidak hanya digunakan untuk menghadapi ancaman tradisional seperti konflik antarnegara, tetapi juga untuk merespons ancaman non-tradisional, termasuk radikalisasi dan terorisme pasca-konflik (Muara et al., 2021). Terdapat dua pendekatan utama dalam pelaksanaan diplomasi keamanan. Pertama, diplomasi keamanan yang dilakukan oleh institusi keamanan negara seperti TNI dan Polri yang berkolaborasi dengan mitra luar negeri untuk mencegah penyebaran radikalisme. Kedua, pendekatan diplomasi klasik yang dijalankan oleh Kementerian Luar Negeri melalui forum internasional dan kerja sama bilateral untuk membangun pemahaman bersama dan merumuskan langkah-langkah pencegahan ekstremisme.

Salah satu kebijakan strategis Indonesia dalam bidang ini adalah perwujudan komitmen terhadap agenda kontra-terorisme global yang berakar pada pendekatan human security. Dalam hal ini, Indonesia melalui BNPT, Kementerian Luar Negeri, dan Kepolisian menjalankan strategi diplomasi keamanan yang menasar tidak hanya penindakan terhadap pelaku ekstremisme, tetapi juga penanggulangan akar penyebab radikalisasi khususnya di wilayah pasca-konflik seperti Poso. Indri Ceria Agustin dan Ampuan Situmeang (2023) menyatakan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berperan penting dalam menangani radikalisme pasca konflik di Poso melalui pendekatan deradikalisasi, kontra-radikalisasi, dan pembangunan sosial. BNPT menjalankan program pembinaan terhadap mantan narapidana terorisme, mendorong integrasi mereka ke masyarakat, serta memperkuat ketahanan masyarakat melalui edukasi, pelatihan, dan kerja sama dengan tokoh agama dan masyarakat lokal. Selain itu, BNPT menggandeng lembaga pemerintah dan organisasi lokal untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan mencegah penyebaran ideologi ekstremis di wilayah rawan konflik seperti Poso (Agustin & Situmeang, 2023). Diplomasi keamanan Indonesia berperan penting dalam membangun sinergi internasional untuk menangani ancaman radikalisasi.

Indonesia secara aktif terlibat dalam forum-forum multilateral seperti ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC), ASEAN Our Eyes, dan Global Counterterrorism Forum (GCTF), di mana isu radikalisme pasca-konflik dibahas sebagai bagian dari ancaman kawasan. Dalam forum-forum ini, Indonesia mendorong pertukaran praktik terbaik dalam deradikalisasi dan penguatan kapasitas institusional negara-negara Asia Tenggara dalam menangani kelompok ekstremis lokal. Indonesia juga memperluas kerja sama bilateral dengan negara seperti Australia, Amerika Serikat, dan Arab Saudi dalam bidang pelatihan aparat keamanan, pendanaan program kontra-radikalisme, serta pengembangan sistem pemantauan jaringan teror global (US Mission To ASEAN, 2024).

Di tingkat lokal, Indonesia juga menerapkan pendekatan keamanan berbasis masyarakat, terutama di wilayah rawan seperti Poso. Pemerintah melibatkan tokoh agama, pemuda, dan masyarakat sipil dalam program-program pencegahan radikalisme, seperti kampanye damai, pelatihan vokasi bagi mantan narapidana, serta pembinaan kewirausahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Strategi ini bertujuan memutus rantai regenerasi ideologi ekstremis melalui jalur non-militer (Mubarok, 2014). Selain itu, pendekatan berbasis kultural dan religius yang khas Indonesia seperti melalui pesantren moderat dan budaya lokal digunakan untuk membendung narasi ekstrem yang merusak kohesi sosial. Melalui pendekatan diplomasi keamanan yang berbasis hukum, Indonesia tidak hanya berupaya menekan ancaman terorisme, tetapi juga membangun ketahanan sosial-politik dari dalam (Sirua & Priyambodo, 2022). Keberhasilan diplomasi ini terlihat dari stabilitas yang relatif terjaga di wilayah-wilayah pasca-konflik seperti Poso, meskipun tantangan radikalisme masih tetap ada. Pendekatan diplomasi keamanan Indonesia yang menekankan keseimbangan antara penindakan dan pembangunan perdamaian jangka panjang, menjadi model yang relevan untuk negara-negara lain dalam menangani radikalisme berbasis konflik lokal.

Dengan demikian, strategi diplomasi keamanan Indonesia merupakan elemen krusial dalam menjamin stabilitas nasional dan mendorong terwujudnya perdamaian berkelanjutan. Peran aktif Indonesia dalam berbagai forum dan kerja sama bilateral serta pendekatan berbasis masyarakat memperlihatkan komitmen Indonesia dalam menjaga keamanan domestik melalui jalur damai. Diplomasi ini juga memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang tidak hanya

kuat dalam menghadapi terorisme, tetapi juga berkomitmen terhadap tata kelola keamanan global yang adil dan inklusif.

Kerja Sama Regional

Indonesia aktif terlibat dalam berbagai kerja sama regional yang bertujuan untuk memperkuat diplomasi keamanan dan menanggulangi radikalisme pasca konflik. Sejumlah kerja sama regional berikut menjadi instrumen penting dalam memperkuat kapasitas Indonesia dalam menanggulangi radikalisasi pasca konflik.

- Kerja Sama Trilateral Indonesia–Malaysia–Filipina (Trilateral Cooperative Arrangement/TCA), merupakan bentuk kerja sama regional yang berfokus pada penguatan keamanan maritim dan penanggulangan kejahatan lintas batas, termasuk terorisme dan radikalisasi. Kerja sama ini berfokus pada pengamanan kawasan perairan Sulu–Sulawesi melalui patroli laut dan udara bersama, pertukaran informasi intelijen, dan respons cepat terhadap ancaman lintas batas seperti terorisme, penyelundupan senjata, dan pergerakan kelompok ekstremis (Delpriani, 2024). Melalui Kerja Sama Trilateral ini, Indonesia mampu menangani ancaman radikalisme pasca-konflik di Poso secara lebih efektif. Kerja sama ini memungkinkan dilakukannya patroli laut dan udara bersama dan peningkatan respons terhadap aktivitas lintas batas seperti infiltrasi kelompok radikal serta penyelundupan senjata dari Filipina Selatan, wilayah yang dikenal sebagai basis militan yang terhubung dengan jaringan radikal di Indonesia termasuk MIT di Poso. Dengan memperkuat pengawasan wilayah perbatasan dan mencegah masuknya ideologi serta logistik ekstremis dari luar negeri kerja sama ini berkontribusi langsung dalam mengisolasi kelompok radikal lokal, memutus dukungan lintas negara, serta mencegah kebangkitan kembali radikalisme di wilayah pasca-konflik. Oleh karena itu, TCA menjadi bagian dari strategi diplomasi keamanan Indonesia yang bersifat preventif dan kolektif dalam rangka menjaga stabilitas jangka panjang di wilayah rawan seperti Poso (Delpriani, 2024).
- Kerja Sama melalui ASEAN (ASEAN Convention on Counter-Terrorism (ACCT), AMMTC dan ASEANAPOL): Melalui kerja sama dalam kerangka ACCT, Indonesia memperoleh dukungan regional dalam menangani berbagai tantangan terkait terorisme dan radikalisasi termasuk yang bersifat pasca-konflik seperti di Poso. ACCT

memberikan landasan hukum dan politik bagi negara-negara ASEAN untuk bekerja sama dalam mencegah dan memberantas terorisme melalui pendekatan yang komprehensif dan berbasis hak asasi manusia (Wibowo et al., 2023). Dengan berpartisipasi aktif dalam ACCT, Indonesia dapat memperluas diplomasi keamanannya sekaligus memastikan bahwa isu radikalisme tidak hanya ditangani secara domestik, tetapi juga menjadi perhatian bersama di kawasan Asia Tenggara. Kerja Sama melalui ini, khususnya melalui AMMCT dan ASEANAPOL merupakan bentuk kerja sama regional yang fokus pada penanggulangan kejahatan lintas negara, termasuk terorisme dan radikalisme. AMMTC berperan dalam merumuskan kebijakan bersama dan rencana aksi regional, sementara ASEANAPOL memperkuat kerja sama intelijen, pelatihan kepolisian, dan operasi keamanan lintas batas (Wibowo et al., 2023). Melalui kerja sama ini, Indonesia dapat mengakses dukungan regional dalam menangani ancaman radikalisme pasca konflik khususnya di wilayah rawan seperti Poso yang memiliki potensi terhubung dengan jaringan radikal lintas negara. Pertukaran informasi, peningkatan kualitas dan kuantitas aparat, dan respons kolektif menjadi instrumen penting dalam mencegah kebangkitan kelompok radikal local (Wibowo et al., 2023). Oleh karena itu, melalui kerja sama ini Indonesia dapat memperkuat strategi diplomasi keamanannya, sehingga mampu membuat strategi yang efektif dan berkelanjutan untuk menghadapi tantangan radikalisme pasca konflik secara regional dan terkoordinasi.

- Kerja Sama dalam Forum ARF (ASEAN Regional Forum): Fokus kerja sama ARF adalah membangun kepercayaan dan mendorong kerja sama di bidang keamanan kawasan termasuk penanggulangan terorisme, kejahatan transnasional, dan radikalisme. Hal ini tercermin dalam ARF Work Plan on Counter-Terrorism and Transnational Crime (CTTC) 2024–2026 yang menekankan pentingnya kerja sama dalam mencegah dan menangani ancaman tersebut melalui pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi (ARF, 2024). Melalui ARF, Indonesia dapat memperkuat strategi diplomasi keamanannya dengan menjalin kerja sama teknis dan strategis dalam menangani radikalisme seperti melalui pelatihan kontra-radikalisme, penguatan deradikalisme, serta kerja sama intelijen dan pemantauan perbatasan. Meski ARF tidak secara spesifik menyoroti wilayah seperti Poso, dukungan internasional yang diperoleh

Indonesia melalui forum ini dapat memperkuat kapasitas nasional dalam mencegah kebangkitan radikalisme di daerah pasca-konflik (ARF, 2024). Oleh karena itu, kerja sama melalui ARF dapat menjadi bagian dari strategi diplomasi keamanan Indonesia yang bersifat multilateral dan mendukung upaya menanggulangi radikalisme pasca konflik secara lebih menyeluruh.

Melalui berbagai forum dan inisiatif kerja sama regional, Indonesia tidak hanya memperkuat strategi diplomasi keamanannya, tetapi juga berkontribusi dalam upaya kolektif menanggulangi radikalisme pasca konflik. Kerja sama ini mempertegas komitmen Indonesia dalam menciptakan kawasan yang aman, stabil, dan bebas dari ancaman ekstremisme kekerasan.

Kerja Sama Internasional

Selain aktif dalam kerja sama regional, Indonesia juga menjalin berbagai kerja sama internasional sebagai bagian dari strategi diplomasi keamanan untuk menangani ancaman radikalisme pasca konflik. Sejumlah kerja sama internasional berikut menjadi instrumen penting dalam memperkuat kapasitas Indonesia dalam menanggulangi radikalisasi pasca konflik.

- Kerja Sama Indonesia dengan Amerika Serikat Counter Terrorism: Indonesia dan Amerika Serikat telah menjalin kerja sama erat dalam bidang kontra-terorisme sejak awal 2000-an. Melalui program *Antiterrorism Assistance (ATA)* yang diselenggarakan oleh *Diplomatic Security Service (DSS)* AS. Fokusnya adalah pelatihan teknis untuk aparat penegak hukum Indonesia, peningkatan kapasitas dalam investigasi kejahatan terorisme, keamanan transportasi, dan penanganan bahan peledak (Harwanto et al., 2016). Kerja sama ini diperkuat dengan dukungan dalam bidang intelijen dan pertukaran informasi untuk menghadapi ancaman terorisme yang berkembang. Kerja sama ini memperkuat kemampuan teknis Indonesia dalam menangani jaringan terorisme yang sering muncul di wilayah pasca-konflik seperti Poso. Dengan pelatihan dan dukungan dari AS, Indonesia mampu menerapkan strategi kontra radikalisasi yang lebih efektif.

- Kerja Sama dengan Australia melalui Indonesia-Australia Counter-Terrorism Cooperation: Indonesia dan Australia memiliki hubungan kerja sama yang erat dalam bidang kontra-terorisme yang diformalkan melalui pertemuan rutin seperti *Bilateral Consultation on Counter-Terrorism*. Kerja sama ini mencakup pertukaran intelijen, pelatihan bersama, koordinasi dalam menghadapi ancaman terorisme regional, dan pelatihan untuk deradikalisasi (Ramadhani et al., 2021). Termasuk di dalamnya program rehabilitasi dan reintegrasi bagi mantan teroris dan keluarganya. Fokus rehabilitasi dengan penting dalam konteks pasca-konflik Poso, di mana eks kombatan dan simpatisan kelompok radikal membutuhkan pendekatan lunak untuk reintegrasi sosial.
- Kerja Sama dengan UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*): Indonesia bekerja sama dengan UNODC dalam mencegah dan melindungi anak dari keterlibatan ekstremisme kekerasan, termasuk melalui program pelatihan dan pengembangan program reintegrasi sosial. Kerja sama ini juga mencakup perlindungan anak-anak dari keterlibatan dalam kelompok teroris, dengan fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi anak-anak yang terasosiasi dengan kelompok teroris (Kusuma, 2023). Di Poso, sejumlah anak usia remaja pernah terekrut dalam jaringan radikal. Anak usia remaja memang menjadi incaran bagi kelompok radikal untuk di ajak bergabung anggota dalam kelompok radikal. Kolaborasi dengan UNODC ini dapat membantu Indonesia mengembangkan kebijakan perlindungan dan pendekatan berbasis HAM yang memperkuat strategi diplomasi keamanan secara berkelanjutan.
- Kerja Sama dengan Uni Eropa (*EU-Indonesia Counter Terrorism Dialogue*): Indonesia dan Uni Eropa mengadakan dialog keamanan secara berkala untuk membahas isu-isu seperti terorisme dan ekstremisme kekerasan. Melalui dialog keamanan ini, Indonesia dan Uni Eropa bertukar informasi, praktik baik, dan membangun kapasitas dalam menangani ekstremisme kekerasan (Heiduk, 2014). Wilayah pasca konflik seperti Poso memerlukan pendekatan kebijakan yang terkoordinas. Dukungan UE membantu Indonesia merancang kebijakan kontra-radikalisasi yang sejalan dengan standar internasional. Kerja sama ini memperkuat Indonesia secara diplomatik dan

memperdalam strategi keamanan domestik untuk menanggulangi radikalisme pasca konflik.

- *Global Counterterrorism Forum (GCTF)*: Indonesia merupakan anggota aktif GCTF, sebuah forum multilateral yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas dalam menghadapi terorisme dan mencegah penyebaran ideologi ekstremis. Melalui partisipasinya, Indonesia berkontribusi dalam pengembangan kebijakan dan praktik terbaik dalam penanggulangan terorisme serta memperoleh akses ke sumber daya dan jaringan internasional untuk memperkuat upaya nasional. Forum multilateral ini menjadi wadah bagi Indonesia untuk berbagi pengalaman dan menyusun kebijakan internasional dalam kontra terorisme (Darma, 2025). Keikutsertaan Indonesia di GCTF memberikan akses terhadap standar global dan inovasi kebijakan yang dapat diterapkan dalam konteks domestik seperti Poso. Melalui forum ini Indonesia dapat memperluas jaringan diplomatiknya dan memperkuat pengaruhnya dalam membentuk pendekatan global yang relevan dengan konteks pasca konflik lokal.
- *Kerja Sama dengan Jepang dan Korea Selatan*: Indonesia menjalin kerja sama bilateral dengan Jepang dan Korea Selatan dalam bidang kontra-terorisme. Pada 5 Oktober 2023, Indonesia dan Jepang mengadakan Dialog Kontra-Terrorisme Kedua di Jakarta. Pertemuan ini dihadiri oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Indonesia, Komisaris Jenderal Polisi Rycko Amelza Dahniel, dan Duta Besar Jepang untuk Kerja Sama Internasional dalam Penanggulangan Terorisme dan Kejahatan Terorganisir Internasional, Sugiyama Akira. Kedua negara membahas penguatan kerja sama dalam mencegah penyalahgunaan teknologi oleh kelompok teroris, termasuk pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas dalam menghadapi ancaman siber (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2023). Indonesia dan Korea Selatan telah menjalin kerja sama strategis dalam bidang pertahanan dan keamanan. Kedua negara sepakat untuk memperkuat kerja sama dalam isu-isu keamanan, termasuk keamanan siber, operasi penjaga perdamaian, keamanan maritim, dan kontra-terorisme. Kerja sama ini mencakup pertukaran pandangan mengenai isu-isu kawasan, terutama di Indo-Pasifik (Kementrian Pertahanan RI, 2022). Melalui kerja sama dan dialog antara Indonesia dengan Jepang dan Korea Selatan membantu Indonesia memperkuat

keamanan siber dan kapasitas deteksi dini terhadap potensi radikalisme online di daerah rawan seperti Poso. Kerja sama ini mendukung modernisasi strategi diplomasi keamanan Indonesia dengan pendekatan teknologi canggih.

Melalui berbagai kerja sama internasional ini, Indonesia mampu meningkatkan efektivitas strategi diplomasi keamanan dalam menghadapi radikalisme pasca konflik, termasuk wilayah Poso. Dukungan teknis, pertukaran informasi, program rehabilitasi, dan pelatihan dari mitra global memberikan Indonesia alat, kapasitas, dan legitimasi internasional untuk menanggulangi ancaman radikalisme secara komprehensif. Kerja sama regional maupun internasional tersebut membuktikan bahwa strategi diplomasi keamanan Indonesia tidak hanya bersifat nasional, tetap juga terintegrasi dengan inisiatif global yang menjadikannya semakin kuat dalam menangani radikalisme pasca konflik.

4. PENUTUP

Strategi diplomasi keamanan Indonesia dalam menanggulangi radikalisme pasca-konflik di Poso menunjukkan pendekatan yang komprehensif dan adaptif terhadap dinamika ancaman non-tradisional. Melalui kombinasi pendekatan domestik dan internasional, Indonesia tidak hanya mengandalkan operasi militer atau penegakan hukum, tetapi juga mengintegrasikan program deradikalisasi, rekonsiliasi sosial, dan pembangunan kapasitas kelembagaan. Keterlibatan aktif Indonesia dalam kerja sama regional seperti TCA, ACCT, AMMTC, dan ARF, serta kerja sama internasional dengan negara-negara seperti Amerika Serikat, Australia, Jepang, dan Korea Selatan, memperkuat diplomasi keamanan Indonesia melalui pertukaran informasi, pelatihan, serta dukungan teknis dan strategis. Pendekatan ini memungkinkan Indonesia merespons radikalisme secara lebih efektif, terutama di wilayah rawan seperti Poso, dengan menekankan kolaborasi, pencegahan, dan pemulihan pasca-konflik secara berkelanjutan. Dengan demikian, diplomasi keamanan menjadi pilar penting dalam menjaga stabilitas nasional dan memperkuat posisi Indonesia sebagai aktor konstruktif dalam keamanan kawasan dan global.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, I. C., & Situmeang, A. (2023). Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam menanggulangi radikalisme dan terorisme di Indonesia. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(2), 354–383. <https://ejurnal.umbima.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/188>
- Alganih, I. (2016). Konflik Poso (Kajian historis tahun 1998–2001). *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 5(2), 166–174. <https://core.ac.uk/download/pdf/267825143.pdf>
- ASEAN Regional Forum. (2024). ASEAN Regional Forum work plan for counter terrorism and transnational crime 2024–2026. https://aseanregionalforum.asean.org/wp-content/uploads/2024/07/6.-ARF-2024-2026-CTTC-Work-Plan_26-July_FINAL-CONSENSUS.pdf
- Asrori, S. (2019). Mengikuti panggilan jihad; argumentasi radikalisme dan ekstremisme di Indonesia. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 4(1). <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/AJIP/article/view/911>
- Darma, S. (2025). Peran Indonesia dalam kerja sama internasional melawan terorisme melalui Global Counterterrorism Forum pada tahun 2023–2024. *Diplomacy and Global Security Journal: Jurnal Mahasiswa Magister Hubungan Internasional*, 2(1), 60–70.
- Delpriani, D. (2024). Peran ASEAN terhadap pemberantasan terorisme di Indonesia tahun 2001–2016 (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia). <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/51695/17323098.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Harwanto, A. T., Utomo, T. C., & Hanura, M. (2016). Implementasi kerja sama Indonesia-Amerika Serikat dalam counter terrorism: Hasil program Diplomatic Security Service Antiterrorism Assistance terhadap kasus terorisme di Indonesia tahun 2003–2014. *Diponegoro Journal of International Relations*, 2(1), 18–24.
- Heiduk, F. (2014). In it together yet worlds apart? EU–ASEAN counter-terrorism cooperation after the Bali bombings. *Journal of European Integration*, 36(7), 697–713.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2022, October 29). Perkuat kerja sama pertahanan, The 2nd 2+2 SOM menjadi wujud komitmen Indonesia sebagai special strategic partnership Korea Selatan. <https://www.kemhan.go.id/strahan/2022/10/29/perkuat-kerja-sama-pertahanan-the-2nd-22-som-menjadi-wujud-komitmen-indonesia-sebagai-special-strategic-partnership-korea-selatan.html>
- Kusuma, A. (2023). Kerjasama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan terorisme di Indonesia tahun 2018–2020 (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta).

- Mertayasa, I. K. (2014). Pola adaptasi masyarakat Hindu di Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso pasca konflik Poso. *Widya Genitri: Jurnal Ilmiah Pendidikan, Agama dan Kebudayaan Hindu*, 5(1), 65–77.
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2023, October 11). The 2nd Japan–Indonesia Counter-Terrorism Dialogue. https://www.mofa.go.jp/fp/is_sc/page23e_000659.html
- Muara, T., Rahmat, H. K., & Prasetyo, T. B. (2021). Efektivitas diplomasi dan komunikasi strategis dalam kampanye melawan terorisme di Indonesia. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 23(1), 161–170. <https://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb/article/view/3139>
- Mubarok, H. (2014). Memperkuat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). *Dialog*, 37(2), 195–206. <https://jurnaldialog.kemenag.go.id/index.php/dialog/article/view/66>
- Ramadhani, N. K., Hikam, M., & Munabari, F. (2021). The joint efforts of Indonesian and Australian governments in countering terrorism: Intelligence cooperation. *Deviance: Jurnal Kriminologi*, 5(1), 1–19.
- Sirua, A. A. D., & Priyambodo, M. A. (2022). Kebijakan pemerintah dalam menanggulangi terorisme di wilayah Indonesia bagian timur (Poso). *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 2161–2168.
- Supriadi, E., Ajib, G., & Sugiarto, S. (2020). Intoleransi dan radikalisme agama: Konstruk LSM tentang program deradikalisasi. *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)*, 4(1), 53–72. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/JSW/article/view/4544>
- Wibowo, Y. O., Nau, N. U. W., & de Fretes, C. H. (2023). Upaya Indonesia dalam memerangi terorisme melalui kerja sama ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT). *Administratus*, 7(2), 114–129.
- Wijaya, N. (2020). Resolusi konflik berbasis budaya oleh masyarakat Kabupaten Poso. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(1), 58–63. <https://jurnal.unpad.ac.id/jkrk/article/view/27048>